

**KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(SMK₃)
DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**



KRISPINUS DUMA

VISI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



- Kesehatan untuk semua dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur terbaik di luar Jawa-Bali

MISI PEMBANGUNAN ISI KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



1. Memfasilitasi pemeliharaan dan peningkatan upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan,
2. Mendorong dan menggerakkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan membangun kemitraan dengan lintas sektor.
3. Mengembangkan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkesinambungan.
4. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel.

Latarbelakang



- PP RI No 38 tahun 2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- PP RI No 50 tahun 2012, ttg Penerapan SMK3
- SMK3 perlu kesiapan di pusat maupun di daerah untuk menghadapi pemberlakuan SJSN 2014 dan arus globalisasi pasar bebas dunia pada tahun 2020.
- Propinsi Kalimantan Timur memiliki perusahaan bertaraf internasional, nasional dan lokal perlu kesiapan kebijakan SMK3 sesuai peraturan pusat dan menuntun perkembangan kebijakan SMK3 di tingkat kabupaten/kota seKaltim.

Dasar Hukum



UUD RI 1945 pasal 27 ayat 2 :Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

UU RI no. 1 / 1970 tentang keselamatan kerja

UU RI no. 13 / 2003 tentang ketenaga kerjaan

UU RI No 40 / 2004 tentang SJSN

PP RI No 38 /2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

PP RI No 50 /2012 ttg Penerapan SMK3

PerPres RI No 12/2013 tentang JAMINAN KESEHATAN



- Ketentuan UU RI No.1 Tahun 1970 (pasal 15 ayat 1) masih bersifat umum (*lex generalist*), peraturan pelaksanaannya dijabarkan secara teknis dan rinci dalam bentuk PP, Keppres, Permenaker, Kepmenaker, SE Menaker dan Kepdirjen Binwasnaker Depnakertrans RI.

Tujuan Penelitian



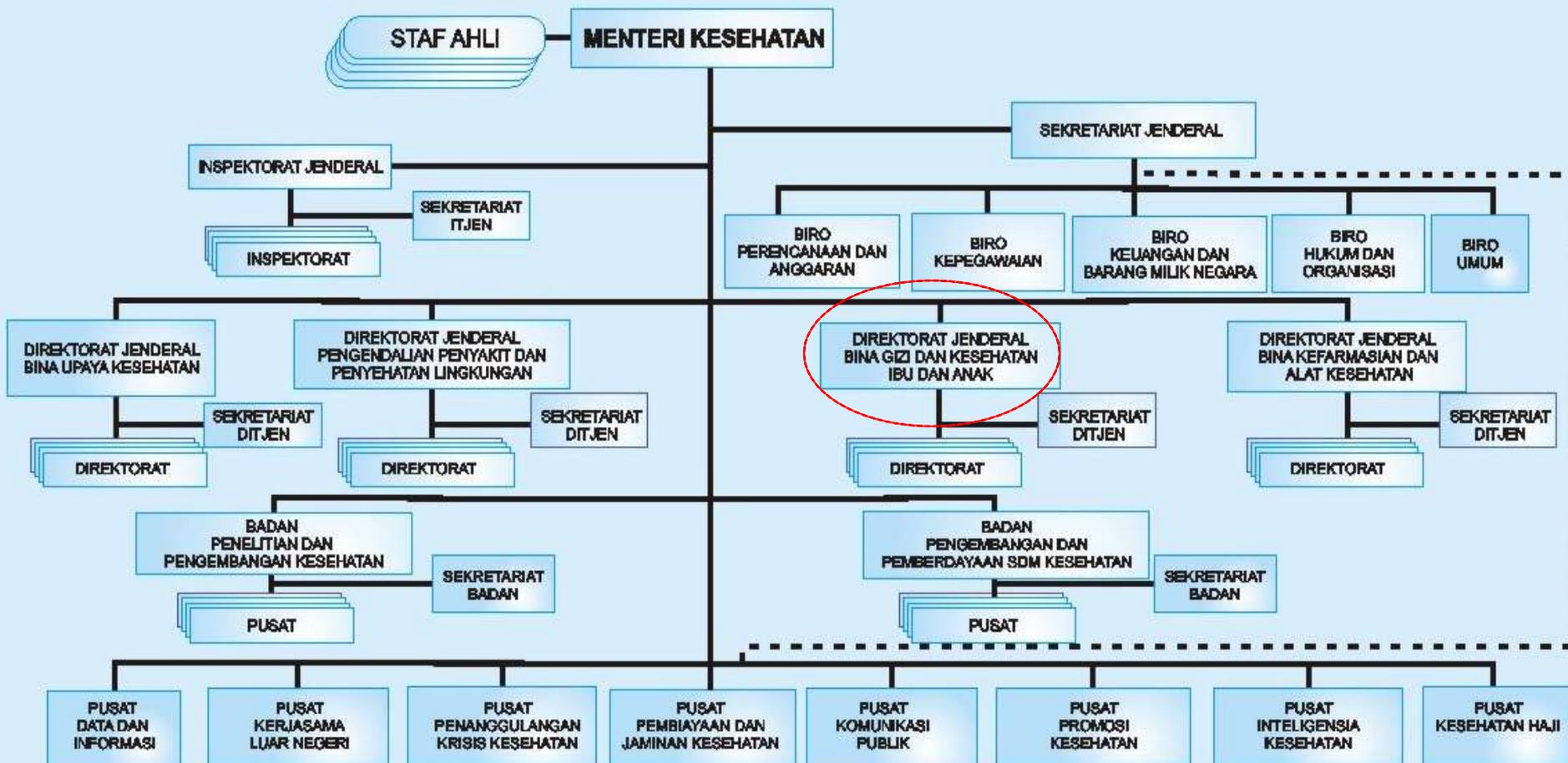
- untuk mengetahui kebijakan SMK3 (PERDA dan KEPEGUB) Kalimantan Timur (otonomisasi daerah) dalam menyongsong pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2014 dan globalisasi pasar bebas 2020

Metode.



- Penelitian kualitatif dengan pendekatan triangulasi :
 - Sumber data → legislatif, eksekutif dan instansi pelaksana kebijakan SMK3.
 - metode → wawancara, observasi, dan survei

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi,
 Staf Ahli Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat,
 Staf Ahli Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan,
 Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi,
 Staf Ahli Bidang Mediko Legal

DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
DR.dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM & H, MARS
(Direktur Jenderal)

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Dr. Kuwat Srihudoyo, MS
(Sekretaris)

**DIREKTORAT
BINA KESEHATAN KERJA DAN
OLAHRAGA**
Dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS
(Direktur)

**SUBBAG
TATA USAHA**
Tasripin, SKM, MKM
(Kasubbbag TU)

**SUBDIT
BINA PELAYANAN
KESEHATAN KERJA**
Dr. Dina Dariana, MS
(Kasubdit)

**SUBDIT
BINA KAPASITAS KERJA**
Jelsi Natalia Marampa,
SKM, M.KKK
(Kasubdit)

**SUBDIT
BINA LINGKUNGAN KERJA**
Dr. Elisabeth Lumban
Tobing
(Kasubdit)

**SUBDIT
BINA KEMITRAAN
KESEHATAN KERJA**
Rosani Azwar, SKM, M.Kes
(Kasubdit)

**SUBDIT
BINA PERKOTAAN DAN
OLAHRAGA**
Dr. Imran Agus Nurali,
Sp.KO
(Kasubdit)

**DIREKTORAT
BINA KESEHATAN KERJA
DAN OLAHRAGA**
Dr. Asjikin Imna Hidayat
Dachlan, MHA
(Direktur)

**SEKSI
STANDARDISASI**
Dr. Darwin
(Kasie)

**SEKSI
BIMBINGAN DAN
EVALUASI**
Dr. Bambang Setia
Sutrisna
(Kasie)

**SEKSI
STANDARDISASI**
Ika Ratnawati, SKM
(Kasie)

**SEKSI
BIMBINGAN DAN
EVALUASI**
Rosidi Roslan,
S.IP, SKM, MPH
(Kasie)

**SEKSI
STANDARDISASI**
Dr. Guntur Argana,
M.Kes
(Kasie)

**SEKSI
BIMBINGAN DAN
EVALUASI**
Syahrul Efendi
Panjaitan,
SKM, M.KKK
(Kasie)

**SEKSI
STANDARDISASI**
Drg. Triati
Sarwastuti, M.Kes
(Kasie)

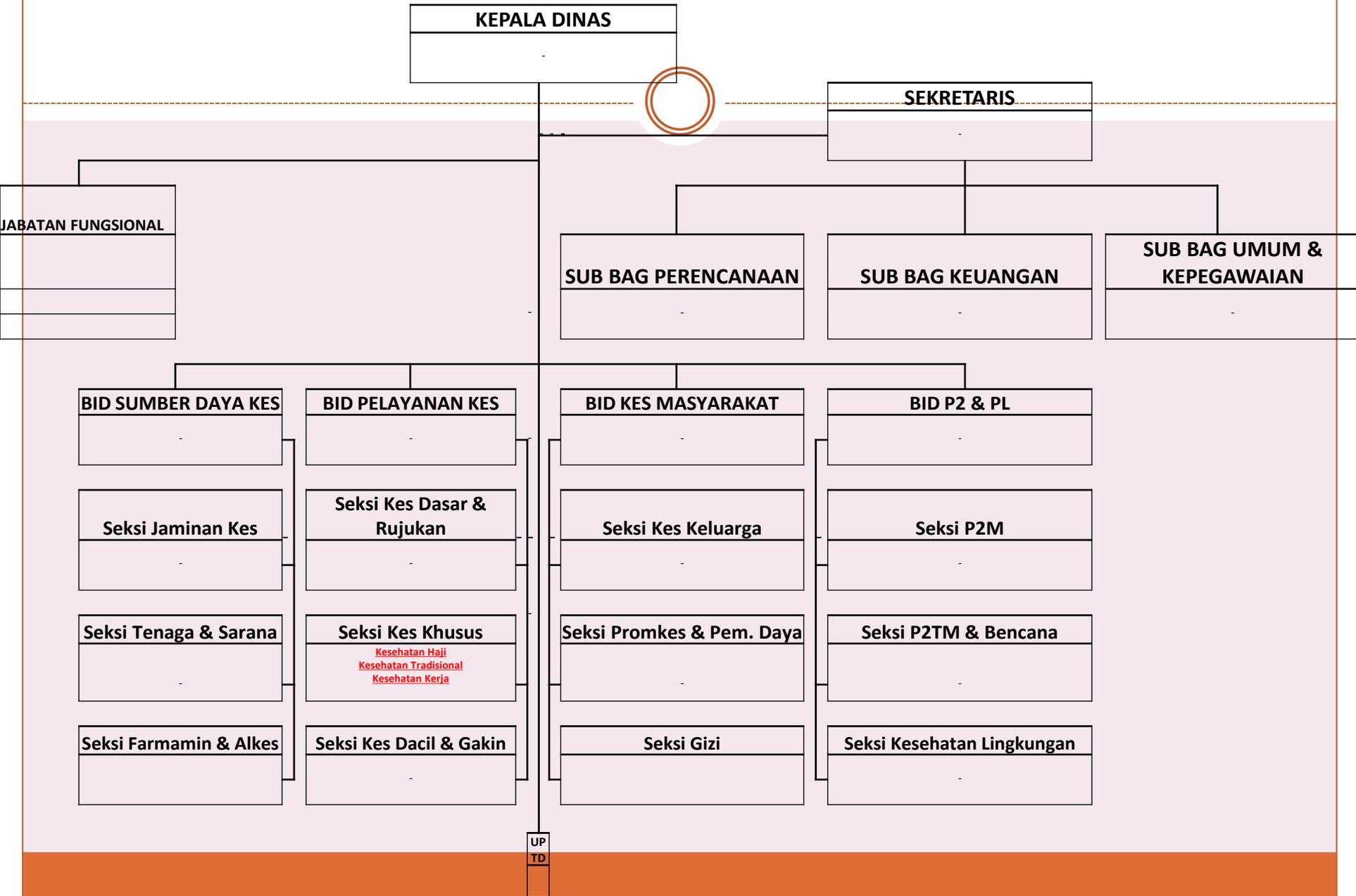
**SEKSI
BIMBINGAN DAN
EVALUASI**
Drs. Sunarja, MM
(Kasie)

**SEKSI
STANDARDISASI**
Dr. Eny Riangwati
Tanzil, Sp.KO
(Kasie)

**SEKSI
BIMBINGAN DAN
EVALUASI**
Drg. Wahyu
Nudroho, MPH
(Kasie)

KEL. JABFUNG

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



- STAF AHLI MENTERI**
1. BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
 2. BIDANG OTONOMI DAERAH
 3. BIDANG KEPENDUDUKAN
H.A. AZIS RIYAT M, SH, MH.
 4. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH
 5. BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN INTERNASIONAL

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

SEKRETARIAT JENDERAL
 Dr. Ir. MUCHTAR LUTHFI, MMA

INSPEKTORAT JENDERAL
 KOMARUDDIN MAKKI, SH

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
 Ir. DJUHARSA M DJAJADIHARJA, MM

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Drs. A. MUJI HANDAYA, M.Si
DIREKTUR JENDERAL

SEKRETARIS DITJEN
 Ir. TIMBIR SAUT PARULIAN SIAHAAN, M.Kes

KABAG. PROGRAM, EVALUASI & PELAPORAN
 Drs. HERMAN PRAKOSO HDAYAT, M.M

KABAG. KEUANGAN
 MARIANA EVERLIEN NOJIA, S.H

KABAG. HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI
 PARWITO, S.H., M.Si

KABAG. KEPEGAWAIAN DAN UMUM
 NOADIMAN, S.H., M.H

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
 Drs. A. MUJI HANDAYA, M.Si

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 Ir. JAMALLUDIN MALIK

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 Ir. ROOSARI TYAS WARDANI, MA

DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
 NUR ASIAH, SH

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA KERJA
 Drs. TJUTJU SUHENDAR, M.M

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA HUBUNGAN KERJA DAN PERLINDUNGAN BERSERIKAT
 BERNAWAN SINAGA, S.H., M.Si

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA PENCIPTAPAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
 GHAZMAHADI, S.T., M.T

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
 TRI HARYANTO, S.Sos., M.Si

DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
 Ir. AMRI AK, MM

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA MEKANIK, PESAWAR, UAP & BEJANA TEKAN
 Drs. AGUS SUNARYO, M.M

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA KONSTR. BANGUNAN, LISTRIK & PENAGULANGAN KEBAKARAN
 Ir. CHANDRA KURNIAWAN

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA KESEHATAN KERJA
 DEDADI GUNELAR, S.P.Si, M.M

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA LINGKUNGAN KERJA DAN BAHAN BERBAHAYA
 Ir. AMRI AK

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA KELEMBAGAAN, KEAHLIAN & SISTEM MANAJEMEN K3
 ELIZABETH SIMBOLON, S.H

DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK
 Drs. ADJI DHARMA

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA KERJA PEREMPUAN
 Drs. SUMARYONO

KASUBDIT PENGAWASAN NORMA KERJA ANAK
 Drs. LAUREND SINAGA

KASUBDIT KERJASAMA LINTAS SEKTORAL
 Dra. WARSINI, M.Si

KASUBDIT ADVOKASI TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK
 Ir. NETTY FARIDA SILALAH, M.M

DIREKTUR BINA PENEGAKAN HUKUM
 BAKHTIAR, SH, MH

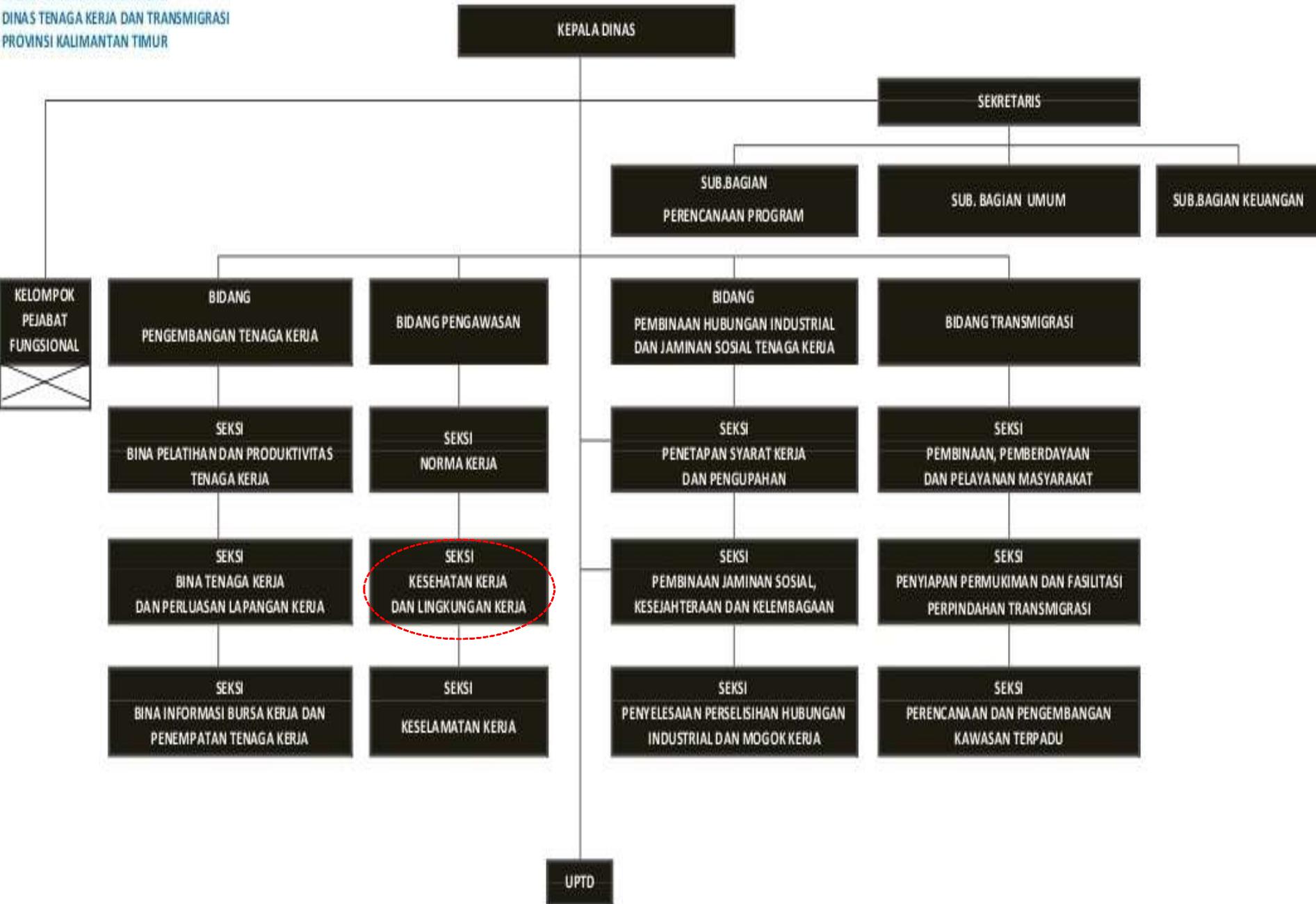
KASUBDIT PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN
 SYAMSUL BAHRU, S.H

KASUBDIT PENYIDIKAN NORMA KETENAGAKERJAAN
 BAKHTIAR, S.H., M.H

KASUBDIT PENGEMBANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPL
 YOSEP SUSANTO, S.H., M.H

KASUBDIT KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM
 HERMAN BAGUS WICAKSONO, S.T., M.K3

Kelompok Jabatan Fungsional



Hasil



- Beberapa Kebijakan Kepgub : retribusi pendapatan dan belanja daerah di bidang kesehatan
- Belum ada kepgub berkaitan Kebijakan SMK₃
- Institusi pelaksana (Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja atau instansi lainnya) UU-peraturan pusat
- Perda 20 tahun 2008 tentang sistem kesehatan propinsi Kaltim, namun belum menyentuh SMK₃.
- belum ada Perda atau KepGub Kaltim yang berkaitan dengan kebijakan SMK₃.

Peraturan Daerah



No	No Perda	Tentang kebijakan	Kes	SMK3
1	Perda No. 05 Tahun 2007,	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.		
2	Perda No. 20 Tahun 2008	Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.		
3	Pergub No 01 Tahun 2010	standard pelayanan minimal rumah sakit umum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur		
4	Perda No. 6 tahun 2011,	Mutu Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur		
	Perda No 1 tahun 2012	Retribusi Jasa Umum (>> kesehatan)		

Keputusan Gubernur



No	No KepGub	Tentang Kebijakan	Kes	SMK3
1	Keputusan Gubernur No 060/K.430/2009	Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Prov. Kaltim		
2	Keputusan Gubernur No 440/K.197/2011	Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalimantan Timur.		
3	Keputusan Gubernur No 440/K.403/2011	Pembentukan Kelompok Kerja Millenium Depelopment Goals (MDGs) Provinsi Kalimantan Timur.		
4	Keputusan Gubernur No 440/K.508/2011	Pembentukan Satuan Tugas Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Provinsi Kalimantan Timur.		

Kesimpulan



- Kebijakan SMK3 dalam bentuk perda atau keputusan gubernur belum tersedia secara khusus di Propinsi Kaltim dalam menghadapi pemberlakuan SJSN 2014 dan arus globalisasi pasar bebas 2020.

SARAN



- Diperlukan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Propinsi Kaltim untuk mewujudkan kebijakan SMK3 yang lebih konkrit dan nyata dalam bentuk perda atau Keputusan Gubernur.



**SAMPAI JUMPA
DI KONAS IAKMII
BERIKUTNYA !!!**